

Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited) 2024

KPU Kabupaten Agam

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

KPU Kabupaten Agam adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kabupaten Agam. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lubuk Basung, 28 Januari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran

Oktadonis S.Pd., M.IP
19761015 200502 1 005

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Agam yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Lubuk Basung, 28 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Oktadonis, S.Pd., M.IP

NRP.19761015 200502 1 005

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Agam Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1,333,718 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,333,718 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp97,430,552,014 atau mencapai 98.27 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp99,150,432,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp4,369,611,102 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1,756,467,719; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2,613,143,383 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4,369,611,102

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp100,612,596,237 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-100,612,596,237, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp344,887,718 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-100,612,596,237

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp3,685,495,346, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-100,267,708,519 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -24,048,778 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 100,975,873,053 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp4.369.611.102

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

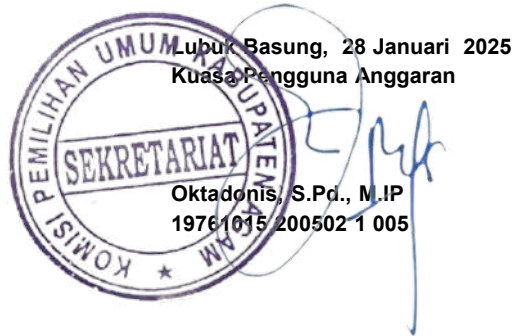
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

U R A I A N	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	1,333,718	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	1,333,718	-	-
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	2,931,168,000	2,914,148,863	99.42	2,571,646,247
Belanja Barang	B.2.2	95,589,564,000	93,886,764,989	98.22	22,532,607,619
Belanja Modal	B.2.3	629,700,000	629,638,162	99.99	1,096,793,000
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		99,150,432,000	97,430,552,014	98.27	26,201,046,866

Lupur Basung, 28 Januari 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran

Oktadonis, S.Pd., M.IP
 19761015 200502 1 005



NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

U R A I A N	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	1,519,899,219	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	186,000,000	434,000,000
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.14	-	-
Persediaan	C.15	50,568,500	1,195,482,764
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		1,756,467,719	1,629,482,764
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	180,600,000	180,600,000
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	3,316,030,957	2,686,392,795
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	1,525,978,242	1,182,424,242
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(2,409,465,816)	(1,993,404,455)
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		2,613,143,383	2,056,012,582
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		4,369,611,102	3,685,495,346
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	4,369,611,102	3,685,495,346
JUMLAH EKUITAS		4,369,611,102	3,685,495,346
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4,369,611,102	3,685,495,346

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	-	-
Jumlah Pendapatan		-	-
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	2,914,148,863	2,511,306,947
Beban Persediaan	D.4	5,420,525,535	70,984,000
Beban Barang dan Jasa	D.5	82,454,206,819	18,653,992,362
Beban Pemeliharaan	D.6	173,916,459	174,120,713
Beban Perjalanan Dinas	D.7	9,257,785,978	2,764,006,511
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	392,012,583	295,517,867
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		100,612,596,237	24,469,928,400
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(100,612,596,237)	(24,469,928,400)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	344,887,718	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		344,887,718	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(100,267,708,519)	(24,469,928,400)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(100,267,708,519)	(24,469,928,400)


 Lubuk Basung, 28 Januari 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Oktadonis, S.Pd., M.IP
 19761015 200502 1 005

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	3,685,495,346	1,202,650,949
SURPLUS/DEFISIT -LO	E.2	(100,267,708,519)	(24,469,928,400)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
	E.4	(24,048,778)	(14,606,522)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	(274,522)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	(750,000)
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	(24,048,778)	(13,582,000)
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		(24,048,778)	(14,606,522)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	100,975,873,053	26,967,379,319
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		684,115,756	2,482,844,397
EKUITAS AKHIR	E.6	4,369,611,102	3,685,495,346



Lubuk Basung, 28 Januari 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran

Oktadennis, S.Pd., M.IP
 19761015 200502 1 005

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

*Dasar hukum Entitas
dan Rencana
Strategis*

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam merupakan instansi vertikal yang mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam.

Komisi Pemilihan Umum didirikan sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum dan Pemilihan di Indonesia yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan dan akuntabel. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Entitas berkedudukan di Jalan Veteran No. 7, Padang Baru, Lubuk Basung, Agam.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam. Melalui peran tersebut diharapkan menghasilkan Pemilihan Umum yang berkualitas.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Komisi Pemilihan Umum mempunyai visi “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Kabupaten Agam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari KPU Kabupaten Agam. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2,931,168,000	2,931,168,000
Belanja Barang	95,589,564,000	95,589,564,000
Belanja Modal	629,700,000	629,700,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	99,150,432,000	99,150,432,000

Realisasi Pendapatan
Rp1,333,718

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1,333,718 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan KPU Kabupaten Agam terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,333,718. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	1,333,718	-
Jumlah	-	1,333,718	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,333,718	-	-
Jumlah	1,333,718	-	-

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp1,333,718

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp1,333,718 dan Rp0. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0.00 dari TA 2023 karena terdapat pengembalian sisa belanja barang berupa operasional Badan Ad Hoc PPK dan PPS Se-Kabupaten Agam Tahun 2023. Terdapat 2 kali pengembalian senilai Rp 1.161.750,00 yang dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan kode NTPN 5D4182CPQ74Q25BM dan Rp 171.968,00 yang dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan kode NTPN 44DBD5229MRV95B5.. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,333,718	-	-
Jumlah	1,333,718	-	-

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1,333,718	-	-
Jumlah	1,333,718	-	-

Realisasi Belanja
Rp97,430,552,014

B.2 Belanja

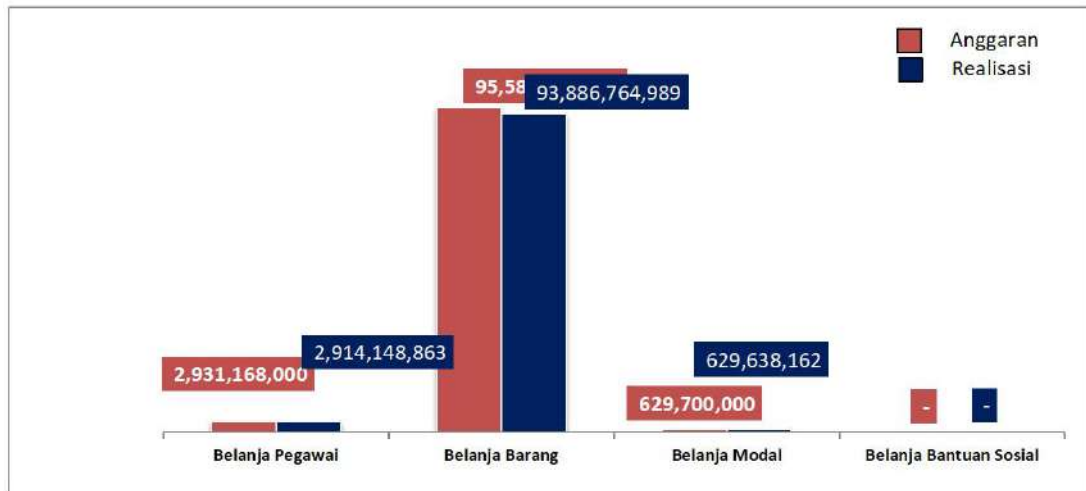
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp97,430,552,014 atau 98.27 % dari anggaran belanja sebesar Rp.99,150,432,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	2,931,168,000	2,914,148,863	99.42
Belanja Barang	95,589,564,000	93,886,764,989	98.22
Belanja Modal	629,700,000	629,638,162	99.99
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	99,150,432,000	97,430,552,014	98.27

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 271.86% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	2,914,148,863	2,571,646,247	13.32
Belanja Barang	93,886,764,989	22,532,607,619	316.67
Belanja Modal	629,638,162	1,096,793,000	(42.59)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	97,430,552,014	26,201,046,866	271.86

*Realisasi Belanja Pegawai
Rp2,914,148,863*

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,914,148,863 dan Rp2,571,646,247. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 13.32 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan karena Per September 2024, terdapat 3 (tiga) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mendapatkan gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan khusus/kegiatan/kinerja dan uang makan.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	777,498,900	715,340,400	8.69
Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,056	12,065	8.21
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	51,376,290	49,067,060	4.71
Belanja Tunj. Anak PNS	17,253,646	15,204,392	13.48
Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	47,880,000	-
Belanja Tunj. PPh PNS	28,989,415	40,540,304	(28.49)
Belanja Tunj. Beras PNS	45,479,760	45,190,080	0.64
Belanja Uang Makan PNS	65,580,000	107,588,000	(39.05)
Belanja Tunjangan Umum PNS	28,210,000	28,570,000	(1.26)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	827,417,826	709,523,482	16.62
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	842,035,500	812,730,500	3.61
Beban Gaji Pokok PPPK	73,682,800	-	-
Jumlah Belanja kotor	2,914,262,692	2,571,646,283	13.32
Pengembalian Belanja Pegawai	113,829	36	316,091.67
Jumlah Belanja	2,914,148,863	2,571,646,247	13.32

Realisasi Belanja
Barang
Rp93,886,764,989

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp93,886,764,989 dan Rp22,532,607,619. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 316.67% dari Realisasi TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh karena ada pembayaran honorarium untuk 12.047 orang KPPS, 3.442 orang petugas ketertiban TPS dan pembayaran operasional untuk 1.721 TPS dalam rangka melaksanakan pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Selain itu, pada tanggal 13 Juli 2024 telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk DPD RI Dapil Sumatera Barat yang meningkatkan realisasi Belanja Barang Non Operasional karena adanya pembayaran honorarium untuk 12.047 orang KPPS, 3.442 orang petugas ketertiban TPS dan operasional untuk 1.721 TPS. Terakhir, telah dibayarkan juga honorarium untuk 8.477 orang KPPS dan 2.422 gastib serta operasional di 1.211 TPS dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 27 November 2024.

Atas Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, terdapat peningkatan yang disebabkan oleh adanya pengadaan logistik untuk pelaksanaan Pemilu 2024 dan PSU DPD RI Dapil Sumatera Barat.

Per September 2024, juga terdapat peningkatan atas Belanja Perjalanan Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 serta PSU DPD RI dan terakhir adalah Pilkada Serentak Tahun 2024, termasuk di dalamnya kegiatan bimbingan teknis yang melibatkan Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	176,542,990	179,657,600	(1.73)
Belanja Barang Non Operasional	78,375,724,437	18,236,143,944	329.78
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,250,895,733	507,693,033	343.36
Belanja Jasa	3,653,939,392	673,490,818	442.54
Belanja Pemeliharaan	171,876,459	172,915,713	(0.60)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	9,265,226,115	2,776,590,681	233.69
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	93,894,205,126	22,546,491,789	316.45
Pengembalian Belanja	7,440,137	13,884,170	(46.41)
Jumlah Belanja	93,886,764,989	22,532,607,619	316.67

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2024

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Rp629,638,162

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp629,638,162 dan Rp1,096,793,000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 42.59% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh karena pada Tahun 2024, terdapat belanja modal yang terdiri dari :

- 1) Belanja modal Peralatan, mesin, karpet dan AC pada tanggal 13 Juni 2024 di CV. Matiinu Berdikari sebesar Rp 234.000.000,00
- 2) Belanja modal peralatan elektronik dan mesin keperluan kantor di CV. Proxy Computama sebesar Rp 217.738.162,00
- 3) Belanja modal berupa pengadaan AC LG sebanyak 2 Unit di CV. Matiinu Berdikari sebesar Rp 23.600.000,00
- 4) Belanja modal peralatan mobiler kantor di PT. Wira Agung Jaya Abadi sebesar Rp 119.500.000,00
- 5) Belanja modal berupa gorden kantor KPU Agam di Yar Gorden sebesar Rp 34.000.000,00.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	629,638,162	441,550,000	42.60
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	655,243,000	(100.00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	629,638,162	1,096,793,000	(42.59)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	629,638,162	1,096,793,000	(42.59)

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023 . Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp629,638,162*

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp629,638,162 dan Rp441,550,000, mengalami kenaikan sebesar 42.60 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh karena pada Tahun 2024, terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang terdiri dari :

- 1) Belanja modal Peralatan, mesin, karpet dan AC pada tanggal 13 Juni 2024 di CV. Matiinu Berdikari sebesar Rp 234.000.000,00
- 2) Belanja modal peralatan elektronik dan mesin keperluan kantor di CV. Proxy Computama sebesar Rp 217.738.162,00
- 3) Belanja modal berupa pengadaan AC LG sebanyak 2 Unit di CV. Matiinu Berdikari sebesar Rp 23.600.000,00
- 4) Belanja modal peralatan mobiler kantor di PT. Wira Agung Jaya Abadi sebesar Rp 119.500.000,00
- 5) Belanja modal berupa gorden kantor KPU Agam di Yar Gorden sebesar Rp 34.000.000,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	629,638,162	441,550,000	42.60
Jumlah Belanja Kotor	629,638,162	441,550,000	42.60
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	629,638,162	441,550,000	42.60

*Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp0*

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp655,243,000 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100.00% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari -.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	655,243,000	(100.00)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	655,243,000	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	655,243,000	(100.00)

*Realisasi Belanja Modal,
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0*

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan -.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan -.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2023. Belanja Bantuan Sosial -.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Uang Tunai di Kas Bendahara	-	-
Uang di Rekening Bendahara	1,519,899,219	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	1,519,899,219	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Uang di Rekening Bendahara Pengeluaran Per Desember 2024 merupakan anggaran hibah untuk Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2024 sebesar Rp 1.519.899.210,00 yang tersimpan di Rekening BSI 7656155005 An. RPL 011 PDHL KPU AGAM UTK 2Y6RVC8A.

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Jenis	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan
Rp50,568,500

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp50,568,500 dan Rp1,195,482,764. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	36,708,500	8,238,500
Bahan untuk Pemeliharaan	13,860,000	185,000
Jumlah	50,568,500	1,195,482,764

Persediaan tersebut di atas dalam Pada Tahun 2024 terdapat penurunan Persediaan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan terdapat belanja persediaan untuk logistik Pemilu 2024 yang telah digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 serta logistik Pemungutan Suara Ulang DPD RI Dapil Sumbar yang telah digunakan pada tanggal 13 Juli 2024. Penurunan Persediaan pada Triwulan Tahun 2024 terjadi karena pengadaan Logistik dilakukan pada Tahun 2023.

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2024. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
	Jumlah	-	-

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Debitur	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Debitur	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang
lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih-Piutang Jgk
Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2024 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp180,600,000 dan Rp180,600,000. Nilai Tanah tersebut Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebesar Rp 180.600.000,00 terletak di Jl. Veteran No. 7 Padang Baru, Lubuk Basung, Kabupate Agam dengan luas 1.680 m2. . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	180,600,000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	180,600,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2024

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp3,316,030,957 dan Rp2,686,392,795. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	2,686,392,795
Mutasi tambah:	
Pembelian	629,638,162
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	3,316,030,957
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(2,260,004,272)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1,056,026,685

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

Pada Tahun 2024 terdapat penambahan nilai pendapatan mesin sebesar Rp.629.638.162 berupa pembelian 54 buah peralatan dan mesin terdiri dari:

- 1 buah rak besi senilai Rp.7.969.500
- 4 buah meja kerja kayu senilai Rp.27.800.000
- 2 buah kursi besi/metal senilai Rp.12.000.000
- 4 buah kursi kayu senilai Rp.42.000.000
- 1 buah sofa senilai Rp.15.800.000
- 1 buah mesin penghisap debu/vacuum cleaner senilai Rp.2.970.000
- 1 buah lemari es senilai Rp.4.120.875
- 10 buah AC Split senilai Rp.102.200.000
- 8 buah dispenser senilai Rp.10.989.000
- 1 buah karpet senilai Rp.156.200.000
- 1 buah gordyin/kray senilai Rp.34.000.000
- 1 buah professional Sound System senilai Rp.21.085.144
- 2 buah lensa kamera senilai Rp.14.490.123
- 1 buah lampu blitz kamera senilai Rp.1.868.130
- 6 buah kursi zeis senilai Rp.21.900.000
- 1 buah laptop senilai Rp.48.143.700
- 6 buah tablet PC senilai Rp.95.183.970
- 3 buah printer (peralatan personal komputer) senilai Rp.10.917.720

Penjelasan tentang Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

-
-
-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp1,525,978,242

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,525,978,242 dan Rp1,182,424,242. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	1,182,424,242
Mutasi tambah:	
Perolehan Lainnya	343,554,000
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	1,525,978,242
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(149,461,544)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1,376,516,698

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Agam mendapatkan reward bank dari Bank BSI terkait rekening penampung dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 dengan nilai sebagai berikut:

- a. Berita Acara Serah Terima Nomor KPU: 181/RT.04.1/1306/2024 Nomor BSI: 04/0108-3/320 pada tanggal 8 Mei 2024 berupa pembuatan partisi ruangan kantor senilai Rp.137.894.000
- b. Berita Acara Serah Terima Nomor KPU: 293/RT.04.1/1306/2024 Nomor BSI: 04/548-3/320 pada tanggal 19 Agustus 2024 berupa pengecoran halaman kantor senilai Rp.205.660.000

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-	-
-	-
-	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-	-
-	-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-	-
-	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Mutasi tambah/kurang:

0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp2,409,465,816

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp2,409,465,816 dan Rp1,993,404,455. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3,316,030,957	(2,260,004,272)	1,056,026,685
2	Gedung dan Bangunan	1,525,978,242	(149,461,544)	1,376,516,698
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		4,842,009,199	(2,409,465,816)	2,432,543,383

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Konsesi Jasa Rp0

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga Rp0

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2024

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Aset Tak Berwujud Rp0 **C.38 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada KPU Kabupaten Agam berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a.	-
b.	-
c.	-
d.	-
e.	-

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan Rp0

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya Rp0

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023
Dana Lainnya	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

*Dana Cadangan
Perwakilan RI di Luar
Negeri Rp0*

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

Aset Lain-lain Rp0

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang

-	-
-	-
-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 0

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	-	-	-

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan	
Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :
hibah yang belum disahkan berasal dari bank

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut		
Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :
9afhasgdfgsdaifsgdhaf

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut		
Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :
berasal dari gedung yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :	
Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :
jjhkjhgcgjhgcjghckj

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :
tentang konsesii jasa

Ekuitas Rp4,369,611,102

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4,369,611,102. dan Rp3,685,495,346. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Rp0

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Pegawai
Rp2,914,148,863

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,914,148,863 dan Rp2,511,306,947.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 16.04 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh . Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	777,385,300	715,340,400	8.67
Beban Pembulatan Gaji PNS	12,827	12,029	6.63
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	51,376,290	49,067,060	4.71
Beban Tunj. Anak PNS	17,253,646	15,204,392	13.48
Beban Tunj. Struktural PNS	47,880,000	47,880,000	-
Beban Tunj. PPh PNS	28,989,415	40,540,304	(28.49)
Beban Tunj. Beras PNS	45,479,760	45,190,080	0.64
Jumlah	2,914,148,863	2,511,306,947	16.04

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5,420,525,535 dan Rp70,984,000

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,536.26 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Beban persediaan tahun 2024 naik secara signifikan dibandingkan tahun 2023. Kenaikan persediaan tahun 2024 dikarenakan terdapat Logistik Pemilu 2024 serta Pemungutan Suara Ulang DPD RI Dapil Sumatera Barat. Logistik Pemilu 2024 diadakan oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Agam. Pengadaan yang diadakan oleh KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Sumatera Barat ditransfer masuk ke KPU Kabupaten Agam. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	70,074,000	70,984,000	(1.28)
Beban Persediaan bahan baku	5,350,451,535	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	5,420,525,535.00	70,984,000	7,536.26

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp82,454,206,819 dan Rp18,653,992,362.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 342.02 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Kenaikan Beban Barang dan Jasa disebabkan :

- (1) Honorarium Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS,
- (2) Pembuatan TPS dan Operasional KPPS Dalam Pemungutan Suara Pemilu 2014
- (3) Distribusi Logistik Pemilu 2024.

Selain itu, kenaikan Beban Barang dan Jasa per triwulan Tahun 2024 juga disebabkan oleh adanya Pemungutan Suara Ulang DPD RI Dapil Sumbang yang menimbulkan realisasi atas pembayaran Honorarium Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS PSU, Pembuatan TPS dan Operasional KPPS Dalam Pemungutan Suara PSU serta Distribusi Logistik PSU. . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	40,000	(100.00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	73,504,000	134,040,000	(45.16)
Beban Barang Operasional Lainnya	44,688,600	21,495,000	107.90
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Bahan	4,261,415,810	2,248,164,620	89.55
Beban Honor Output Kegiatan	51,401,358,000	14,282,990,000	259.88
Beban Barang Non Operasional Lainnya	22,681,140,312	1,703,689,324	1,231.30
Beban Langganan Listrik	78,893,714	60,695,415	29.98
Beban Langganan Telepon	2,696,024	5,017,175	(46.26)
Jumlah	82,454,206,819	18,653,992,362.00	342.02

Beban Pemeliharaan
Rp173,916,459

D.6 **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp173,916,459 dan Rp174,120,713.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0.12 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penurunan beban pemeliharaan disebabkan adanya penurunan tingkat kerusakan gedung dan peralatan mesin Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46,046,418	34,423,730	33.76
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	125,830,041	138,491,983	(9.14)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,040,000	1,205,000	69.29
Jumlah	173,916,459	174,120,713	(0.12)

Beban Perjalanan Dinas
Rp9,257,785,978

D.7 **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9,257,785,978 dan Rp2,764,006,511

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 234.94 persen disebabkan oleh Kenaikan Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 disebabkan oleh:

- (1) Bimbingan Teknis terhadap PPK, PPS dan KPPS terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024
- (2) Bimbingan Teknis terhadap PPK, PPS dan KPPS terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang DPD RI Dapil Sumbar.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 .

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	4,408,684,228	1,341,762,961	228.57
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	81,910,000	18,600,000	340.38
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,767,191,750	1,403,643,550	239.63
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah	9,257,785,978.00	2,764,006,511	234.94

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.8 **Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagaai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.10 **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp392,012,583 dan Rp295,517,867.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	355,788,115	272,145,252	30.73
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36,224,468	23,372,615	54.99
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumah Penyusutan	392,012,583	295,517,867	32.65
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	392,012,583	295,517,867	32.65

D.11 **Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bea Masuk Tindakan	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp344,887,718

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp344,887,718 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1,333,718	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	1,333,718.00	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Beberapa akun tidak disajikan secara khusus karena pada awal penanganan pandemi belum menggunakan akun khusus, dan telah dipertanggungjawabkan bendahara dengan SPM/SP2D GUP tanggal 5 April 2020 senilai Rp45.000.000 , sehingga tidak teridentifikasi oleh sistem akuntansi

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.3,685,495,346.00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3,685,495,346.00 dan Rp.1,202,650,949.00

Defisit LO
Rp.100,267,708,519.00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.100,267,708,519.00 dan Rp.24,469,928,400.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-24,048,778 dan Rp.-14,606,522 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0.00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.-274,522.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp.0.00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-750,000. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0.00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2024

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp-
24,048,778

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-24,048,778 dan Rp.-13,582,000. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(24,048,778)
	-
Jumlah	(24,048,778.0)

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp100,975,873,053

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.100,975,873,053 dan Rp.26,967,379,319. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	64,450,451,233
Diterima dari Entitas Lain	(1,333,718)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	2,026,755,538
Pengesahan Hibah Langsung	34,500,000,000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	100,975,873,053

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 64,450,451,233, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 1,333,718

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2024

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2,026,755,538 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 34,500,000,000 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2024

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam	Uang	34,500,000,000
-	-	-
Total Pengesahan		34,500,000,000.00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		34,500,000,000

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.4,369,611,102.00 dan Rp.3,685,495,346.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

*Ekuitas Akhir
Rp4,369,611,102*

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

KPU Kabupaten Agam mengajukan SP2HL dengan nomor 0246/656155/2024 dengan nilai Rp.6.645.899.352 dan SPHL telah diterbitkan oleh KPPN Bukittinggi. Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-1/PB/PB/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Perpanjangan Penyelesaian Administrasi terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, KPU Kabupaten Agam mengajukan pembatalan (Void) terkait SP2HL dengan nomor 0246/656155/2024 dengan nomor surat nomor 14/KU.03.2-SD/1306/2025 tanggal 13 Januari 2025. KPU Kabupaten Agam mengajukan SP2HL baru dengan nomor 0247/656155/2024 dan terbit SPHL (SP2D) dengan nomor 240110600110006 tanggal selesai SP2D 16 Januari 2025. Pembatalan SP2HL ini mengakibatkan timbulnya To Do List Pada Monsakti yang tidak bisa hilang sebesar Rp.621.631.465. Masih munculnya To Do List pada monsakti dikarenakan terdapat koreksi akun belanja 521219 untuk belanja Persediaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 yang sudah didetailkan serta sudah habis pakai yang terdapat pada SP2HL nomor 0246/656155/2024 (telah divoid) menjadi akun 521811 pada SP2HL nomor 0247/656155/2024, koreksi kesalahan kode barang tidak akan menghilangkan dari to do list.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

2.1 Tanah

KPU Kabupaten Agam menerima tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Agam. Sekarang tanah tersebut sudah memiliki sertifikat dan dibalik nama an. Pemerintah Republik Indonesia cq. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2.2 Pengelola Keuangan

Sesuai dengan SK Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 10 Januari 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Agam, pengelola keuangan tersebut terdiri atas:

1. Kuasa Pengguna Anggaran	: Oktadonis, S.Pd., M.IP
2. Pejabat Pembuat Komitmen	: Fery Aprinal, S.H., M.Si
3. Pejabat Pembuat Komitmen	: Defrizal, S.Kom
4. PPSPM	: Nida Ul Haq, S.H
5. Bendahara Pengeluaran	: Misra Hayati
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu	: Mutiara Nuary Anhas, S.IP
7. Pengelola Keuangan	: Yelna Lestari, S.Pd., dan Nurmaulinda, S.IP
8. Pejabat Pengadaan	: Welzi Martson, S.H.

BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR KPU : 203 / PT.04.1 / 1306 / 2024
NOMOR BSI : 04 / 548 - 3 / 320

Pada hari ini Senin tanggal 19 bulan Agustus tahun 2024, kami masing-masing:

1. Oktadonis, NIP 197610152005021005 Selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, selanjutnya disebut Pihak Kesatu; dan
2. Firman Setiawan, selaku Branch Manager PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk KCP Lubuk Basung, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak kedua dengan ini menyerahkan **barang atau jasa** (Pengecoran Halaman Kantor KPU Kabupaten Agam) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagai berikut:

NO	NAMA PEKERJAAN	NAMA VENDOR	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Pengecoran Halaman Kantor KPU Kabupaten Agam	CV DELTAMAS KONSTRUKSINDO	Rp. 205.660.000	Sudah Diserahkan
Total				Rp. 205.660.000

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di Lubuk Basung
Pada Tanggal 19 Agustus 2024

Pihak Kedua,


(Firman Setiawan)

Pihak Kesatu,


(Oktadonis)

Mengetahui/
Mengesahkan


(Agung Pramono)
Area Manager

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR KPU : 181 / Rt . 04 . 1 / 1306 / 2024
NOMOR BSI : 04 / 0108 - 3 / 320

Pada hari ini Rabu tanggal 08 bulan Mei tahun 2024, kami masing-masing:

1. Oktadonis, NIP 197610152005021005 Selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, selanjutnya disebut Pihak Kesatu; dan
2. Ade Maspandri, selaku Branch Manager PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk KCP Lubuk Basung, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak kedua dengan ini menyerahkan **barang atau jasa** (Pembuatan Partisi Ruang Kantor KPU Agam) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagai berikut:

NO	NAMA PEKERJAAN	NAMA VENDOR	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Pembuatan Partisi Ruang Kantor KPU Agam	CV DELTAMAS KONSTRUKSINDO	Rp. 137.894.000	Sudah Diserahkan
Total				Rp. 137.894.000

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di Lubuk Basung
Pada Tanggal 08 Mei 2024

Pihak Kedua,

(Ade Maspandri)

Pihak Kesatu,

(Oktadonis)

Mengetahui/
Mengesahkan

(Agung Pramono)
Area Manager



ADDENDUM
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 900/15/BKP/2023.
NOMOR : 763/KU.07-NK/1306/2023.
ATAS
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 900/12/BKP/2023.
NOMOR : 620/KU.07-NK/1306/2023
TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-12-2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **ANDRI WARMAN** : Bupati Agam, berkedudukan di Lubuk Basung dan beralamat di Jalan Sudirman Nomor 1 Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat Tanggal 23 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. HERMAN SUSILO : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, berkedudukan dan beralamat di jalan Veteran nomor 7 Lubuk Basung Kabupaten Agam, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, sebagai Penerima Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum pemberian hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Agam dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam **Nomor: 900/12/BKP/2023** dan **Nomor: 620/KU.07-NK/1306/2023** Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan addendum terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah **Nomor: 900/12/BKP/2023** dan **Nomor: 620/KU.07-NK/1306/2023**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan Pasal 4 ayat (3) tentang Mekanisme Pencairan Dana sehingga Pasal 4 ayat (3) berubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

Semula

- (1) Pencairan dana hibah uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Agam ke rekening Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang di kelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada Bank Syari'ah Lubuk Basung nomor rekening 7656155005.

- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah **PARA PIHAK** menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU** dilampiri dengan:
- Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - Pakta Integritas;
 - Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - Fotocopy rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup dan telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebesar Rp. 34.500.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tahap I (satu) dengan besaran 40% (empat puluh persen) dari nilai Hibah atau sebesar Rp. 13.800.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD.
 - Tahap II (dua) dengan besaran 60% (enam puluh persen) dari nilai Hibah atau sebesar Rp. 20.700.000.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus juta rupiah) dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dipersyaratkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

Berubah Menjadi

- (1) Pencairan dana hibah uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Agam ke rekening Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang di kelola oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Agam pada Bank Syariah Lubuk Basung nomor rekening 7656155005.

- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah **PARA PIHAK** menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. Fotocopy rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup dan telah ditandatangani dan distempel.
 - (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebesar Rp. 34.500.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I (satu) sebesar Rp. 13.800.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan dicairkan pada triwulan I (satu) tahun anggaran 2024;
 - b. Tahap II (dua) sebesar Rp. 20.700.000.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus juta rupiah) dan dicairkan pada triwulan II (dua) tahun anggaran 2024.
 - (4) Pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dipersyaratkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.
2. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah **Nomor : 900/12/BKP/2023** dan **Nomor : 620/KU.07-NK/1306/2023** tanggal 10 November 2023.
 3. Hal-hal yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang tidak dilakukan perubahan dalam Addendum ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**

Demikian Addendum ini dibuat dan ditandatangani di Lubuk Basung, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM


HERMAN SUSILO

PIHAK KESATU
BUPATI AGAM


ANDRI WARMAN



the first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

Jalan Khatib Sulaiman No. 3, Padang 25138; TELEPON (0751) 7054731, 7054734, 7051253; FAKSIMILI (0751) 7051020; SUREL : sekretaris.kanwilsumbar@gmail.com; SITUS : www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar

Nomor : S-3019/WPB.03/2023 17 November 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Penerbitan Nomor Register Hibah Satker 076.656155 TA 2023

Yth. KPA Satker KPU Kabupaten Agam (656155)

Sehubungan dengan surat Kepala Satker KPU Kabupaten Agam (656155) Nomor: 405/KU.01.2-SD/1306/2023 tanggal 13 November 2023 yang diterima tanggal 17 November 2023, hal Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, permohonan permintaan Penerbitan Nomor Register Hibah Satker KPU Kabupaten Agam dapat disetujui sebagai berikut:
 - a. Nomor Register Hibah : 2Y6RVC8A
 - b. Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Agam
 - c. Penerima Hibah : KPU Kabupaten Agam
 - d. Nilai Perjanjian Hibah : Rp 34.500.000.000,-
 - e. Batas Waktu Penarikan Hibah : 31 Desember 2025
2. Satker KPU Kabupaten Agam agar dapat mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Sumatera Barat



Ditandatangani secara elektronik
Syukriah HG

Tembusan:

1. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bukittinggi
3. Direktur Sistem Penganggaran, DJA
4. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR

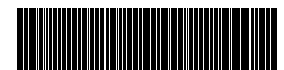


Penetapan Nomor Register

No	Pemberi Hibah	No Perjanjian Hibah	Nama Hibah	Tgl Penandatanganan Perjanjian	Tgl Batas Penarikan/ Closing Date	Bentuk Hibah	Mata Uang	Nilai Hibah	No Register
1	PEMERINTAH KABUPATEN AGAM	900/12/BKP/2023	HIBAH LANGSUNG KAS DARI PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KE KPU KABUPATEN AGAM DALAM RANGKA PILKADA TAHUN 2024	10/11/2023	31/12/2025	KAS	IDR	34,500,000,000.00	2Y6RVC8A

Disclaimer

- Kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan nomor register hibah menjadi tanggungjawab pemohon registrasi hibah
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 BUKITTINGGI
Jl. Prof. Hazairin No.1, Bukittinggi 26116; TELEPON (0752) 21306-21308; FAKSIMILI (0752) 21306; SUREL :
kppn011@kemenkeu.go.id, SITUS : www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi

Nomor : S-383/KPN.0302/2024 30 April 2024
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas nama KPU Kabupaten Agam

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Agam (656155)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara tanggal 30 April 2024 No. 150/KU.03.2-SD/1306/2024 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lubuk Basung untuk keperluan menyalurkan dana dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2024
Rekening tersebut akan diberi nama :
RPL 011 PDH KPU AGAM UTK 2Y6RVC8A
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
 - d. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN.
 - e. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Dapat disampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan zona integritas, kami berkomitmen menjaga integritas dengan memberikan pelayanan secara PRAKTIS: Profesional, Akuntabel, Transparan, Inovatif, dan Sinergi

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
202401165615500000183263

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Bukittinggi



Ditandatangani secara elektronik
Khairil Indra

Tembusan:

1. Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lubuk Basung
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 BUKITTINGGI
Jl. Prof. Hazairin No.1, Bukittinggi 26116; TELEPON (0752) 21306-21308; FAKSIMILI (0752) 21306; SUREL :
kppn011@kemenkeu.go.id, SITUS : www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi

Nomor : S-769/KPN.0302/2023 27 November 2023
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas nama KPU Kabupaten Agam

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Agam (656155)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara tanggal 27 November 2023 No. 433/KU.03.2-SD/1306/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lubuk Basung untuk keperluan menampung Dana Hibah Langsung Kas dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2024 Rekening tersebut akan diberi nama :
RPL 011 PDHL KPU AGAM UTK 2Y6RVC8A
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
 - d. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN.
 - e. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Dapat disampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan zona integritas, kami berkomitmen menjaga integritas dengan memberikan pelayanan secara PRAKTIS: Profesional, Akuntabel, Transparan, Inovatif, dan Sinergi

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
202301165615500000173379

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Bukittinggi



Ditandatangani secara elektronik
Khairil Indra

Tembusan:

1. Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lubuk Basung
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT PENGESAHAN
HIBAH LANGSUNG

Nomor : 00099T/656155/2024
Tanggal : 16-05-2024
Satker : 656155
KPU KABUPATEN A G A M

KPPN : (011)BUKITTINGGI
Tanggal : 17-05-2024
Nomor : 240110000000020
Tahun Anggaran : 2024

Telah disahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah:

Saldo Awal	Rp.	0
Pendapatan	Rp.	13.800.000.000
Belanja	Rp.	0
Saldo Akhir	Rp.	13.800.000.000

Yaitu : Pengesahan Realisasi Hibah Langsung untuk Pembayaran PENDAPATAN HIBAH, Register 2Y6RVC8A HIBAH LANGSUNG KAS DARI PEMERI

Kepala Seksi Pencairan Dana


Muchamad Akbar Fitriantho
NIP. 19711120 199803 1 001

Kuasa Bendahara Umum Negara



979089855

Bukittinggi, 17 MEI 2024
Kepala Seksi Bank/Giro Pos


Ade Setiawan
NIP. 19831028 200412 1 001



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

**SURAT PENGESAHAN
HIBAH LANGSUNG**

Nomor : 00135T/656155/2024
Tanggal : 09-07-2024
Satker : 656155
KPU KABUPATEN A G A M

KPPN : (011)BUKITTINGGI
Tanggal : 10-07-2024
Nomor : 240110000000033
Tahun Anggaran : 2024

Telah disahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah:

Saldo Awal	Rp.	13.800.000.000
Pendapatan	Rp.	20.700.000.000
Belanja	Rp.	0
Saldo Akhir	Rp.	34.500.000.000

Yaitu : Pengesahan Realisasi Hibah Langsung untuk Pembayaran PENDAPATAN HIBAH, Register 2Y6RVC8A HIBAH LANGSUNG KAS DARI PEMERI

Kepala Seksi Pencairan Dana

Muchamad Akbar Fitriantho
NIP. 19711120 199803 1 001

Kuasa Bendahara Umum Negara



979089973

Bukittinggi, 10 JULI 2024
Kepala Seksi Bank/Giro Pos

Ade Setiawan
NIP. 19831028 200412 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT PENGESAHAN
HIBAH LANGSUNG

Nomor : 00226T/656155/2024
Tanggal : 06-12-2024
Satker : 656155
KPU KABUPATEN A G A M

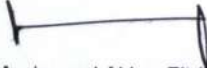
KPPN : (011)BUKITTINGGI
Tanggal : 09-12-2024
Nomor : 240110600110002
Tahun Anggaran : 2024

Telah disahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah:

Saldo Awal	Rp.	34.500.000.000
Pendapatan	Rp.	0
Belanja	Rp.	10.168.894.122
Saldo Akhir	Rp.	24.331.105.878

Yaitu : Pengesahan Realisasi Hibah Langsung untuk Pembayaran BELANJA BARANG DAN JASA, Register 2Y6RVC8A HIBAH LANGSUNG KAS DARI PEMERINTAH

Kepala Seksi Pencairan Dana


Muchamad Akbar Fitriantho
NIP. 19711120 199803 1 001

Kuasa Bendahara Umum Negara



979090075

Bukittinggi, 09 DESEMBER 2024
Kepala Seksi Bank/Giro Pos


Ade Setiawan
NIP. 19831028 200412 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT PENGESAHAN
HIBAH LANGSUNG

Nomor : 00232T/656155/2024
Tanggal : 12-12-2024
Satker : 656155
KPU KABUPATEN A G A M

KPPN : (011)BUKITTINGGI
Tanggal : 13-12-2024
Nomor : 240110600110003
Tahun Anggaran : 2024

Telah disahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah:

Saldo Awal	Rp.	24.331.105.878
Pendapatan	Rp.	0
Belanja	Rp.	15.634.479.307
Saldo Akhir	Rp.	8.696.626.571

Yaitu : Pengesahan Realisasi Hibah Langsung untuk Pembayaran BELANJA BARANG DAN JASA, Register 2Y6RVC8A HIBAH LANGSUNG KAS DARI PEMERI

Kepala Seksi Pencairan Dana

Muchamad Akbar Fitriantho
NIP. 19711120 199803 1 001

Kuasa Bendahara Umum Negara



979090075

Bukittinggi, 13 DESEMBER 2024

Kepala Seksi Bank/Giro Pos

Ade Setiawan
NIP. 19831028 200412 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT PENGESAHAN
HIBAH LANGSUNG

Nomor : 00241T/656155/2024
Tanggal : 20-12-2024
Satker : 656155
KPU KABUPATEN A G A M

KPPN : (011)BUKITTINGGI
Tanggal : 23-12-2024
Nomor : 240110600110004
Tahun Anggaran : 2024

Telah disahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah:

Saldo Awal	Rp.	8.696.626.571
Pendapatan	Rp.	0
Belanja	Rp.	530.828.000
Saldo Akhir	Rp.	8.165.798.571

Yaitu : Pengesahan Realisasi Hibah Langsung untuk Pembayaran BELANJA BARANG DAN JASA, Register 2Y6RVC8A HIBAH LANGSUNG KAS DARI PEMER

Kepala Seksi Pencairan Dana


Muchamad Akbar Fitriantho
NIP. 19711120 199803 1 001

Kuasa Bendahara Umum Negara



Bukittinggi, 23 DESEMBER 2024
Kepala Seksi Bank/Giro Pos


Ade Setiawan
NIP. 19831028 200412 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT PENGESAHAN
HIBAH LANGSUNG

Nomor : 00247T/656155/2024
Tanggal : 31-12-2024
Satker : 656155
KPU KABUPATEN A G A M

KPPN : (011)BUKITTINGGI
Tanggal : 31-12-2024
Nomor : 240110600110006
Tahun Anggaran : 2024

Telah disahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah:

Saldo Awal	Rp.	8.165.798.571
Pendapatan	Rp.	0
Belanja	Rp.	6.645.899.352
Saldo Akhir	Rp.	1.519.899.219

Yaitu : Pengesahan Realisasi Hibah Langsung untuk Pembayaran BELANJA BARANG DAN JASA, Register 2Y6RVC8A HIBAH LANGSUNG KAS DARI PEMERI

Kepala Seksi Pencairan Dana

Muchamad Akbar Fitriantho
NIP. 19711120 199803 1 001

Kuasa Bendahara Umum Negara



979090075

Bukittinggi, 31 DESEMBER 2024

Kepala Seksi Bank/Giro Pos

Ade Setiawan
NIP. 19831028 200412 1 001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (656155) KPU KABUPATEN A G A M

Tgl Data : 26/02/25 12:33 PM
Tgl Cetak : 26/02/25 3:49 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	97,430,552,014
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,333,718	0
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,333,718
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	777,498,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,056	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	51,376,290	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17,253,646	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	28,989,415	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	45,479,760	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	65,580,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	28,210,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	842,035,500	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	73,682,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	615	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,125,760	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,050,304	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12,420,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,141,820	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	7,770,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	827,417,826	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	76,337,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	58,350,390	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	73,504,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	44,688,600	0
3.0	521211	Belanja Bahan	4,261,415,810	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	51,401,358,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22,681,140,312	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	31,810,315	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,250,895,733	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	78,893,714	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,696,024	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,236,500	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	3,571,113,154	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46,046,418	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	125,830,041	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,416,124,365	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	81,910,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (656155) KPU KABUPATEN A G A M

Tgl Data : 26/02/25 12:33 PM
Tgl Cetak : 26/02/25 3:49 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,767,191,750	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	629,638,162	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	113,600
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	229
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	7,440,137
JUMLAH			97,439,439,698	97,439,439,698

Keterangan :
FINAL

UBUK BASUNG, 26 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN AGAM
OKTADONIS
197610152005021005



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (656155) KPU KABUPATEN A G A M

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM
Tgl Cetak : 26/02/25 3:49 PM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,519,899,219	0	1,519,899,219	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	186,000,000	434,000,000	(248,000,000)	(57.14)
Persediaan	50,568,500	1,195,482,764	(1,144,914,264)	(95.77)
JUMLAH ASET LANCAR	1,756,467,719	1,629,482,764	126,984,955	7.79
ASET TETAP				
Tanah	180,600,000	180,600,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,316,030,957	2,686,392,795	629,638,162	23.44
Gedung dan Bangunan	1,525,978,242	1,182,424,242	343,554,000	29.06
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,409,465,816)	(1,993,404,455)	(416,061,361)	20.87
JUMLAH ASET TETAP	2,613,143,383	2,056,012,582	557,130,801	27.10
JUMLAH ASET	4,369,611,102	3,685,495,346	684,115,756	18.56

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,369,611,102	3,685,495,346	684,115,756	18.56
JUMLAH EKUITAS	4,369,611,102	3,685,495,346	684,115,756	18.56
JUMLAH EKUITAS	4,369,611,102	3,685,495,346	684,115,756	18.56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,369,611,102	3,685,495,346	684,115,756	18.56

Keterangan :
FINAL

LUBUK BASUNG, 26 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN AGAM
OKTADONIS
NIP.197610152005021005



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (656155) KPU KABUPATEN A G A M

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM

Tgl Cetak : 26/02/25 3:49 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	1,519,899,219	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	186,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	36,708,500	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	13,860,000	0
0.0	131111	Tanah	180,600,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,316,030,957	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,525,978,242	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,260,004,272
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	149,461,544
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	64,450,451,233
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,333,718	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,026,755,538
0.0	391111	Ekuitas	0	3,685,495,346
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	24,048,778	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	34,500,000,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,333,718
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	343,554,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	777,385,300	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12,827	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	51,376,290	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	17,253,646	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	28,989,415	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	45,479,760	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	65,580,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	28,210,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	842,035,500	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	73,682,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	615	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,125,760	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,050,304	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	12,420,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,141,820	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	7,770,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	827,417,826	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	76,337,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	58,350,390	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	73,504,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (656155) KPU KABUPATEN A G A M

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM
Tgl Cetak : 26/02/25 3:49 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	44,688,600	0
3.0	521211	Beban Bahan	4,261,415,810	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	51,401,358,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	22,681,140,312	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	31,810,315	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	78,893,714	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,696,024	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,236,500	0
3.0	522141	Beban Sewa	248,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	3,571,113,154	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46,046,418	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	125,830,041	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4,408,684,228	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	81,910,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,767,191,750	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	355,788,115	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36,224,468	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	70,074,000	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,040,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	5,350,451,535	0
JUMLAH			107,417,055,651	107,417,055,651

Keterangan :
FINAL

UBUK BASUNG, 26 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN AGAM
OKTADONIS
NIP. 197610152005021005



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN A G A M 656155

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM
Tgl Cetak : 26/02/25 3:49 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	1,333,718	1,333,718	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	1,333,718	1,333,718	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	1,333,718	1,333,718	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	99,150,432,000	97,430,552,014	(1,719,879,986)	98.27	26,372,358,000	26,201,046,866	171,311,134	99.35
1. Belanja Pegawai	2,931,168,000	2,914,148,863	(17,019,137)	99.42	2,639,926,000	2,571,646,247	68,279,753	97.41
2. Belanja Barang	95,589,564,000	93,886,764,989	(1,702,799,011)	98.22	22,606,215,000	22,532,607,619	73,607,381	99.67
3. Belanja Modal	629,700,000	629,638,162	(61,838)	99.99	1,126,217,000	1,096,793,000	29,424,000	97.39
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN A G A M 656155

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM
Tgl Cetak : 26/02/25 3:49 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	99,150,432,000	97,430,552,014	(1,719,879,986)	98.27	26,372,358,000	26,201,046,866	171,311,134	99.35
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

LUBUK BASUNG, 26 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN AGAM

OKTADONIS
NIP 197610152005021005



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (656155) KPU KABUPATEN A G A M

Tgl Data : 26/02/25 12:33 PM
Tgl Cetak : 26/02/25 3:49 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,685,495,346	1,202,650,949	2,482,844,397	206.45
SURPLUS/DEFISIT-LO	(100,267,708,519)	(24,469,928,400)	(75,797,780,119)	309.76
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(24,048,778)	(14,606,522)	(9,442,256)	64.64
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	(274,522)	274,522	(100)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(750,000)	750,000	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(24,048,778)	(13,582,000)	(10,466,778)	77.06
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	100,975,873,053	26,967,379,319	74,008,493,734	274.44
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	684,115,756	2,482,844,397	(1,798,728,641)	(72.45)
EKUITAS AKHIR	4,369,611,102	3,685,495,346	684,115,756	18.56

Keterangan :
FINAL

LUBUK BASUNG, 26 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN AGAM



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (656155) KPU KABUPATEN A G A M

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM
Tgl Cetak : 26/02/25 3:49 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,914,148,863	2,511,306,947	402,841,916	16.041
Beban Persediaan	5,420,525,535	70,984,000	5,349,541,535	7,536.264
Beban Barang dan Jasa	82,454,206,819	18,653,992,362	63,800,214,457	342.019
Beban Pemeliharaan	173,916,459	174,120,713	(204,254)	(0.117)
Beban Perjalanan Dinas	9,257,785,978	2,764,006,511	6,493,779,467	234.941
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

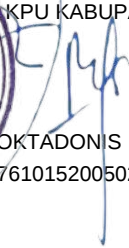


KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (656155) KPU KABUPATEN A G A M

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM
Tgl Cetak : 26/02/25 3:49 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	392,012,583	295,517,867	96,494,716	32.653
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	100,612,596,237	24,469,928,400	76,142,667,837	311.168
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(100,612,596,237)	(24,469,928,400)	(76,142,667,837)	311.168
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	344,887,718	0	344,887,718	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	344,887,718	0	344,887,718	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	344,887,718	0	344,887,718	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(100,267,708,519)	(24,469,928,400)	(75,797,780,119)	309.759
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(100,267,708,519)	(24,469,928,400)	(75,797,780,119)	309.759

Keterangan :
FINAL

LOBUK BASUNG, 26 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN AGAM

OKTADONIS
NIP 197610152005021005

